



RENJA

2025



0 35545 62336 78 1

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Bupati R Soedirman 92 Jombang 61419

Telp. 0321879913 fax. 0321 879913

Email: diskominfo@jombangkab.go.id

Website: kominfo.jombangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor : 188/ 031/415.23/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi OPD serta untuk memberikan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dan menetapkannya dalam Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah

Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang;
7. Surat Edaran Bupati Jombang 050/10827/415.10/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
2. Mengadakan koreksi dan perbaikan atas hasil pekerjaan tim baik pada sistematika dokumen, tahapan penyusunan maupun pelaporan penulisan;
3. Memberikan kontribusi pemikiran secara aktif terhadap penyempurnaan pekerjaan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
4. Memastikan konsistensi dan arah pekerjaan berdasarkan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud Diktum PERTAMA berpedoman pada ketentuan Peraturan PerUndang-

Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Membebaskan segala pembiayaan pelaksanaan kegiatan Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 26 Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASIDAN
INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG**



ENDRO WAHYUDI S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 198005281999121001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 188/ 020 /415.23/2023
TANGGAL : 26 Januari 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025**

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Sekretaris	Sekretaris
3	Anggota	Kabid Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Kabid Aplikasi Teknologi Informasi Kabid Persandian dan Statistik Perencana Ahli Muda,

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 26 Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**

ENDRO WAHYUDI, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 198005281999121001



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Bupati R Soedirman 92 Jombang 61419

Telp. 0321879913 fax. 0321 879913

Email: diskominfo@jombangkab.go.id

Website: kominfo.jombangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/ 46 /415.23/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025, diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan indikator kinerja SKPD sesuai tugas dan fungsi dalam jangka waktu tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang;
19. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 050/10347/415.01/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (RKPD) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2025.
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Belanja yang tercantum dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan.
- KEEMPAT** : Target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran.
- KELIMA** : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan pedoman dalam menyusun

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 26 Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG**

ENDRO WAHYUDI S.STP

Pembina Tk. I

NIP.198005281999121001



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 telah selesai disusun sebagaimana mendasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang yang berisikan program dan kegiatan dalam rangka menunjang tujuan RPD.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Jombang, 26 Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**

ENDRO WAHYUDI, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 198005281999121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	57
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	59
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	62
2.5. Penelaahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat.....	70
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	71
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	72
3.3. Program dan Kegiatan	73
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	89
BAB V PENUTUP	94

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan).....	50
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	51
Tabel	2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Jombang.....	64
Tabel	2.4	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Jombang.....	70
Tabel	3.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Jombang.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang memuat kebijakan program kegiatan pembangunan dan indikator kinerja baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang memuat Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah..

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dan setiap tahunnya berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jombang. Renja Tahun 2025 sebagai penjabaran dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD pada Tahun 2025.

Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Pembangunan Kerja Daerah (RPKD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, yang menyebutkan bahwa penyusunan Renja Tahun 2025 Pemerintah Daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan Renja Tahun 2025 memuat target sasaran/indikator kinerja daerah tahun 2025 yang disepakati dalam Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, Program pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, Capaian realisasi kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2024) dan target capaian kinerja tahun 2025, Pokok-pokok pikiran DPRD, dan target dan capaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan ringkasan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Dana Alokasi Khusus serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penyusunan rancangan Renja 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal OPD sebagai instansi yang baru. Selanjutnya Kepala OPD menetapkan Perubahan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika dengan urusan dan tupoksi sebagai berikut :

a. Urusan

1. Perumusan kebijakan dan program bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan dan program bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan di bidang pengelolaan opini dan

aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
7. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
8. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan riil penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu mengacu antara lain pada :

- a. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- e. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
- f. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- g. Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang;
- h. Surat Edaran Bupati Jombang NOMOR: 050/844/415.01/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program /

kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan. Renja Tahun 2025 dipergunakan sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas dan pokok fungsinya sampai dengan periode tahun 2025.

1..2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RANCANGAN AWAL RENJA PD

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

- **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

- **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- **BAB V PENUTUP**

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025 dengan mengacu pada P-APBD tahun 2024 dan APBD 2025, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang melaksanakan 5 Program, 10 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 20,672,902,497.00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dan realisasi anggaran mencapai Rp. 19.953.935.717 (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah) atau sebesar 96,52%.

Dari Program/kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun capaian pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diarahkan untuk pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah diarahkan untuk pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, untuk meningkatkan konsistensi perencanaan, penganggaran dan evaluasi program Peningkatan Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Sub kegiatan penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipergunakan untuk pemenuhan pelayanan yang menunjang pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan konsistensi perencanaan, penganggaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD tahun 2024 sebesar Rp. 118.511.000 maka didapatkan keluaran (output) utamanya jumlah dokumen 3 (tiga) dokumen meliputi Renja, Renja Perubahan dan Renstra Perubahan. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan IV terealisasi sebesar Rp. 114.743.750 dengan capaian 96,82% yang dipergunakan untuk Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat sebanyak 3 dokumen meliputi Renja, Renja Perubahan dan Renstra Perubahan serta pada P-APBD dilaksanakan Penyusunan dokumen Proses Bisnis.

b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD diarahkan untuk indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP dengan dana dari P-APBD tahun 2024 sebesar Rp. 40.988.000 maka didapatkan keluaran sebanyak 5 (lima) laporan, Laporan Renja Tribulan I, II, III, , IV dan LKjIP. Penyerapan anggaran sampai tribulan IV terealisasi sebesar Rp. 25.826.000 dengan capaian 63.01%.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah diarahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi keuangan daerah untuk pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu serta pemenuhan penyusunan laporan keuangan SKPD yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN daerah diarahkan untuk indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dengan dana dari P-APBD tahun 2024 sebesar Rp. 10.541.131.097. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan IV terealisasi sebesar Rp. 6.023.381.253 atau 57,14% yang dipergunakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 14 kali untuk 32 orang selama 1 tahun. Realisasi tidak tercapai 100% dikarenakan mutasi dan ASN meninggal dunia.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD diarahkan untuk indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan dana dari P-APBD sebesar Rp. 406.922.000. Penyerapan anggaran sampai tribulan IV terealisasi sebesar Rp. 205.912.700 atau 50,60%. Target Kegiatan berupa Laporan Keuangan Akhir Tahun berupa 4 dokumen yaitu Laporan Keuangan Trib I, Trib II, Trib III, Trib IV dan Akhir Tahun. Anggaran tidak tercapai 100% yaitu lembur laporan keuangan dikarenakan satu pegawai mutasi.

c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD diarahkan untuk indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan dana dari P-APBD tahun 2024 sebesar Rp. 6.680.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan tribulan IV Rp. 6.402.000 dengan capaian 95,84%

maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa dokumen laporan keuangan tahunan SKPD sebanyak 1 Dokumen.

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang diarahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah meliputi jumlah pemenuhan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di arahkan untuk Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD tahun 2024 sebesar Rp. 27.639.600 dengan realisasi Rp. 21.823.500 atau 78,96 keluaran (output) yaitu telah terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Gedung Kominfo sebanyak 12 paket selama 1 tahun .

b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di arahkan untuk pemenuhan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan dana dari P-APBD sebesar Rp. 149.436.100, penyerapan anggaran sampai dengan tribulan IV mencapai Rp. 99.342.300 atau 66,48% yang dipergunakan untuk pemenuhan ATK Kantor.

c. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor di arahkan untuk pemenuhan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan dana dari P-APBD sebesar Rp. 259.954.400 dengan realisasi 126.337.460 atau 48.6% yang dipergunakan untuk pemenuhan makanan dan minuman pegawai.

e. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan di arahkan untuk Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan tersedianya dana dari P-APBD 2024 sebesar Rp. 97.949.140 dengan realisasi Rp. 58.351.900 atau 59,57%. yang dipergunakan untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan keluaran (output) jumlah pemenuhan barang cetak 5 paket yaitu fotocopy, stofmap, disposisi dan blanko BBM.

f. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di arahkan untuk Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD 2024 sebesar Rp. 25.224.000 dengan realisasi 12.940.000 atau 51.3% yang dipergunakan untuk pemenuhan belanja koran selama 1 tahun.

g. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD diarahkan untuk Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk Rp. 236.750.650 dengan realisasi Rp. 225.971.890 atau capaian 95.45% yang dipergunakan untuk 4 laporan kegiatan mamin rapat, mamin tamu dan Perjalan Dinas dalam & Luar.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk pemenuhan pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi penyediaan jasa konsumsi, sumber daya air dan listrik, dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- a. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di arahkan untuk Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 761.040.000 dengan peyerapan realisasi tribulan IV Rp. 397.781.185 atau 52,27% yang dipergunakan untuk pembayaran air, listrik dan telepon selama 12bulan.

- b. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor di arahkan untuk pemenuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD 2024 sebesar Rp. 713.802.300 dengan realisasi Rp. 415.880.438 atau 58.26% yangdipergunakan untuk....

- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diarahkan untuk pemenuhan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunanlainnya yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diarahkan untuk Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan

Dibayarkan Pajaknya dengan tersedianya dana dari P-APBD 2024 sebesar Rp. 83.160.000 dengan realisasi 51,17% yang dipergunakan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan berupa BBM, service kendaraan jabatan 1 unit dan pembayaran pajak.

- b. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diarahkan untuk indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan tersedianya dana dari P-APBD 2024 sebesar Rp 353.775.110 dengan realisasi Rp. 188.408.807 atau capaian 53,26% yang dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas jabatan berupa BBM, service kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan operasional sebanyak 17 unit .
- c. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang diarahkan untuk pemenuhan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah kantor dinas yang meliputi jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Dinas Kominfo yang dipelihara. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD 2024 sebesar Rp. 405.993.288 dengan realisasi Rp. 368.768.259 atau capaian 90,83% yang dipergunakan untuk pemeliharaan Gedung Kominfo di Jalan Bupati R. Soedirman No : 92 dan di Jalan Wachid Hasyim No : 133.
- d. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diarahkan untuk Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan

tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 3.868.054.049 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan IV mencapai Rp. 3.836.967.923 atau 99.20% yang dipergunakan untuk pemeliharaan sarpras, pengadaan sarpras dan hibah pada pemerintah pusat di Polres Jombang dan Kejaksaan Negeri Jombang.

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memiliki layanan informasi dengan target 10% dan realisasi 10%

Layanan Informasi yang dimaksud adalah PPID utama yaitu Dinas Kominfo dan PPID Pembantu yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Target 10% yaitu 5 Perangkat Daerah memiliki PPID Pembantu dari 53 Perangkat Daerah meliputi :

1. Inspektorat Kabupaten Jombang;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang;
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang;
6. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang;
7. Dinas Sosial Kabupaten Jombang;
8. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;
9. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang

➤ **Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Indikator kegiatan adalah Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan target Indikator 3,3%. Indikator pada penilaian kegiatan ini merupakan penilaian dari presentasi Jumlah Penduduk usia produktif di Kabupaten Jombang dengan Jumlah peserta sosialisasi yang ada pada dinas Kominfo.

**DATA SOSIALISASI PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
TERKAIT KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG**

No	Nama Aktivitas/Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta	
1	Jumpa fans HUT Radio SJFM dan Pelantikan PWI	Radio SJFM	125	Peserta
2	Goes to Schooll	SMPN NGORO	60	Peserta
3	Dialog Interaktif Warung pojok Kebonrojo Lokal	Resto Arimbi Wonosalam	150	Peserta
4	Dialog Interaktif Warung pojok Kebonrojo Lokal	Pasar Barongan Mojoagung	150	Peserta
5	Rapat koordinasi KKD	AULA Dinas Kominfo	63	Peserta
6	Workshop Pejabat Penghubung Lapor SP4N	AULA Dinas Kominfo	80	Peserta
7	Sosialisasi KIM	Ds.Kwaron,Kec Diwek	90	Peserta
8	Sosialisasi SP4N LAPOR	Universitas PGRI	75	Peserta
9	Bimbingan Teknis PPID	Suro I Pemkab Jombang	75	Peserta
10	Rapat Koordinasi KKD	Aula Dinas Kominfo	65	Peserta
11	Ngopi Bareng bersama Media dan Pegian Medsos	Pendopo Kab.Jombang	200	Peserta
12	Kegiatan Kopilaborasi Pegiat Medsos dan Silaturahmi Media	RUANG BUNG TOMO	150	Peserta
14	Instagram @jombangkab	Instagram	24,600	pengikut
15	Jumlah Pengikut Instagram @kominfo_jombang	Instagram	4,477	pengikut
17	Pengikut di Youtube Jombangkab TV	Youtube	2,190	pengikut
TOTAL			32.550	

Jumlah penduduk usia produktif (15 tahun -64 tahun) dari sumber Dispendukcapil tahun 2024 adalah 967.045 orang, sosialisasi penyebaran informasi publik yaitu 32.550 tercapai dari target 3,3% yang ditetapkan.

Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

2. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan target 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen.

Indikator ini ditunjukkan dengan hasil dokumen (1) Media Cetak, (2) Media Tatap Muka (sosialisasi), (3) dan media elektronik tercapai sesuai dengan sesuai dengan target.

3. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan target 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen. Berupa pelaksanaan kegiatan pengelolaan media yaitu : Audiensi dengan Media, Dialog Interaktif Warung Pojok Kebon Rojo Lokal dan Regional, Jumpa Fans HUT Radio.

4. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik dengan target 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen

Indikator ini ditunjukkan dengan hasil dokumen: (1) Laporan monitoring dan evaluasi PPID, (2) laporan monitoring dan evaluasi Pengaduan Lapor SP4N, dan (3) laporan monitoring dan evaluasi kegiatan KIM

Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID meliputi :

Tahun 2024							
No	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Diperlukan	Tujuan	Keputusan/ Jawaban	Tanggal Jawaban
1	24-1-2024	Baret Mega Lanang	Swasta	File video MP4 beserta laporan pertanggung jawaban seluruh belanja barang/jasa, video dan buku profil dan atau catalog tahun anggaran 2023 (APBD dan PAPBD)	Sosialisasi, edukasi, transparansi publik guna dapat diinformasikan kepada masyarakat Kabupaten Jombang, uji lab digital, dumas jika ditemukan penyimpangan	Informasi yang diminta dapat dilihat di kanal aplikasi SIRUP LKPP pada Bagian Barang dan Jasa	29-1-2024
2	29-4-2024	Baret Mega Lanang	Swasta	- Rincian Belanja PAPBD Dinas Pendidikan Tahun 2023 - Rincian Pendapatan dan Pengeluaran Dana Pasar Desa Mojoduwur Kec. Mojowarno Kab.Jombang	Kelengkapan data dumas, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, transparansi publik guna dapat diinformasikan kepada masyarakat Kabupaten Jombang	Data yang diminta sudah dilaporkan oleh pengurus pasar desa Mojoduwur kepada Pemerintah Desa Mojoduwur. Untuk informasi lebih lengkap pemohon diperkenankan datang langsung ke Kantor Desa Mojoduwur Mojowarno	22-5-2024

Tahun 2024							
No	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Diperlukan	Tujuan	Keputusan/ Jawaban	Tanggal Jawaban
3	6-8-2024	Rochman Alim	Wiraswasta	<p>Permintaan Data dan Informasi Copy/Softcopy Spesifikasi Teknis dan atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut:</p> <p>1. Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang (kode RUP: 47487142) tahun anggaran 2024 senilai total pagu Rp. 1.182.500.000 (Data</p>	Kontrol sosial	Diselesaikan secara internal	15-8-2024

Tahun 2024							
No	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Diperlukan	Tujuan	Keputusan/ Jawaban	Tanggal Jawaban
				<p>terlampir)</p> <p>2. Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa khusus (kode RUP : 51565634) tahun anggaran 2024 senilai total pagu Rp. 1.034.353.500 (Data terlampir)</p> <p>3. Belanja modal kendaraan tak bermotor angkutan barang (kode RUP : 47354638) tahun anggaran 2024 senilai total pagu Rp. 123.475.200 (Data terlampir)</p> <p>4. Belanja modal taman (kode RUP : 51660630) tahun anggaran 2024 senilai total pagu Rp. 1.732.000.000 (Data terlampir)</p> <p>5. Belanja modal tanah untuk bangunan gedung perdagangan/ perusahaan (kode RUP : 36110368) tahun anggaran 2024 senilai total pagu Rp. 3.048.361.800 (Data terlampir)</p>			

Tahun 2024							
No	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Diperlukan	Tujuan	Keputusan/ Jawaban	Tanggal Jawaban
4	9-9-2024	Imam Subagyo	Swasta	- Permintaan Salinan Perizinan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan Jaringan Telekomunikasi yang beroperasi di Kabupaten Jombang	Kontrol sosial	Data yang diminta oleh pemohon tidak dalam penguasaan / belum terdokumentasikan oleh PPID Kabupaten Jombang, data tersebut berada dalam kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika	17-9-2024
5	21-10-2024	Imam Subagyo	Swasta	- Salinan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang sudah ditetapkan tahun 2024, Salinan Data Agen dan Kios Penyalur Pupuk (KPL) Subsidi, Salinan Data Agen dan Pangkalan Gas LPG se-Kabupaten Jombang	Kontrol sosial	Diberikan dalam bentuk salinan	1-11-2024
6	7-11-2024	Apollo Parasian Sihombing	Wiraswasta	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan yang Sumber Pendanaannya dari Bagi Hasil, Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran (TA) 2022-2023 - Pemerintah Kabupaten Jombang	Ikut serta mengambil peran dalam mengawasi penggunaan dana yang bersumber dari keuangan Negara /Daerah	Diselesaikan secara internal	20-11-2024

Tahun 2024

No	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Diperlukan	Tujuan	Keputusan/ Jawaban	Tanggal Jawaban
7	12-11-2024	Agung Suyatno, S.H.	Swasta	<p>1. Salinan izin operasional yang mencakup kegiatan peleburan kuningan di lokasi</p> <p>2. Bukti kepatuhan PT. Salco terhadap penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) terkait kegiatan peleburan kuningan</p> <p>3. Izin Tempat Penimbunan Sementara (TPS) atau Rincian Teknis (Rintek) yang mengatur pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan/atau Limbah Non-B3 di lokasi tersebut</p> <p>4. Izin Pembuangan Air Limbah Cair (IPLC) yang berlaku untuk kegiatan peleburan kuningan di lokasi tersebut</p> <p>5. Pelaporan kinerja pengelolaan limbah, baik B3 maupun Non-B3, yang telah dilaksanakan oleh PT. Salco sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	Kontrol sosial, indikasi terjadinya kegiatan usaha ilegal oleh PT. Salco, Betek, Mojoagung	Data yang diminta oleh pemohon tidak dalam penguasaan / belum terdokumentasikan oleh PPID Kabupaten Jombang, data tersebut berada dalam kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup	18-11-2024
8	28-11-2024	Agung Suyatno, S.H.	Swasta	<p>Legalitas Industri PT. Salco</p> <p>1. Industri alas kaki yang berlokasi di Dsn.Ngembul Desa Kesamben, Kec.Kesamben Kab.Jombang apakah telah memiliki :</p> <p>a) PERTEK dan SLO</p> <p>b) Ijin Pengumpulan Limbah B3 Sementara (TPS) sebagai Penghasil</p> <p>c) Apakah bahan baku berasal dari Impor</p> <p>2. Industri Peleburan Logam Bukan Besi, di Desa Betek Barat, Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang :</p> <p>a) Telah memiliki</p>	Kontrol sosial	Data yang diminta oleh pemohon tidak dalam penguasaan / belum terdokumentasikan oleh PPID Kabupaten Jombang, perusahaan tersebut berstatuskan Penanaman Modal Asing (PMA)	12-12-2024

Tahun 2024							
No	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Diperlukan	Tujuan	Keputusan/ Jawaban	Tanggal Jawaban
				PERTEK dan SLO peleburan logam bukan besi b) Apa saja varian produknya c) Dari mana dan apa saja bahan bakunya d) Pengelolaan limbahnya dengan transporter dan pemanfaat limbah B3 siapa e) Limbah Non B3 nya MoU dengan siapa			
9	11-12-2024	Ali Sutomo	Swasta	Permohonan Data Jumlah Ibu Hamil, Menyusui dan Balita di Kabupaten Jombang	Kontrol sosial	Diberikan dalam bentuk salinan softcopy	16-12-2024

Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan PPID

Kendala yang dihadapi dalam Pelayanan Informasi Publik baik internal maupun eksternal bisa digambarkan sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman para Pejabat PPID Utama maupun PPID Pelaksana terhadap sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
2. Minimnya informasi publik yang disediakan baik secara langsung maupun di website;
3. Kurangnya koordinasi PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi publik;
4. Informasi yang tersedia kurang perbaruan;
5. Rendahnya permintaan informasi di PPID

RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI

Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Kabupaten Jombang dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penguatan Kapasitas Pejabat PPID Utama dan PPID Pelaksana melalui kegiatan sosialisasi
2. Memperbarui instrumen kebijakan layanan informasi dengan menyesuaikan perubahan kebijakan layanan informasi di atasnya, seperti SK PPID, DIP, LLD dsb
3. Meningkatkan publikasi informasi dengan memperbaiki website PPID Kabupaten Jombang dan PPID Pelaksana

4. Memberbarui konten dan update data pada website PPID Utama dan PPID Pelaksana
5. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan agar rencana kerja dapat terealisasi dengan optimal
6. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Pelaksana di lingkup Kabupaten Jombang

**HASIL MONITORING PENGELOLAAN SP4N-LAPOR
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERIODE : OKTOBER – DESEMBER 2024**

NO	INDIKATOR	HASIL	KETERANGAN
1	Pengelolaan Laporan :		
	a. Total Laporan	61 Laporan (tanpa arsip dan tunda)	
	b. Belum Diverifikasi	0 Laporan	
	c. Belum Ditindaklanjuti	2 Laporan	
	d. Proses	16 Laporan	
	e. Selesai	43 Laporan	
	f. Laporan Berulang / Arsip	9 Laporan	
	g. Rata-rata Tindak Lanjut (RTL)	1.5 Hari	
2	Kualitas Tindak Lanjut (% tindaklanjut)	Baik Sekali : 96.7%	
3.	Renaksi Tahun 2024	1. Workshop Bagi Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! 2. Sosialisasi SP4N-LAPOR!	
4.	Kendala dan Hambatan	1. Masih kurangnya sosialisasi ke masyarakat 2. Masyarakat takut dan enggan untuk melapor 3. Kurangnya respon cepat dan kualitas tindaklanjut dari OPD yang berwenang 4. Belum terintegrasinya kanal pengaduan lain dengan SP4N – LAPOR 5. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kanal pengaduan SP4N-LAPOR 6. Tidak semua lapisan masyarakat bisa menggunakan kanal pengaduan SP4n-LAPOR 7. Masyarakat lebih memilih pengaduan yang mudah dan praktis (melalui telepon/ media sosial)	

1. Alternatif / Upaya yang Telah Dilakukan

a) Mengedarkan x-banner SP4N LAPOR ke desa-desa di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jombang



b) Sosialisasi SP4N-LAPOR!



c) Rapat Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR!



d) Sosialisasi melalui banner, youtube, radio SJFM, videotron, Instagram



- e) Menyampaikan di kegiatan sosialisasi SP4N-LAPOR! bahwa di dalam web/aplikasi SP4N LAPOR ada fitur Anonim dan Rahasia, sehingga identitas pelapor aman
- f) Admin Kabupaten rutin menghubungi admin OPD apabila ada aduan yang terkait dengan OPD tersebut agar segera ditindaklanjuti, dan memantau tindak lanjut dari



aduan tersebut sampai selesai.

- g) Melaksanakan koordinasi dengan pimpinan Lembaga/Instansi guna memaksimalkan penggunaan aplikasi SP4N LAPOR



- h) Mengarahkan admin OPD untuk menginput pengaduan manual yang masuk ke OPD tersebut melalui fitur input pengaduan manual di web SP4N-LAPOR!
- i) Melaksanakan kolaborasi antar instansi guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan mendorong pelaksanaan integrasi SP4N-LAPOR!

NO	INDIKATOR	HASIL	KETERANGAN
1	Pengelolaan Laporan :		
	a. Total Laporan	1 (tanpa arsip dan tunda)	
	b. Belum Diverifikasi	0 Laporan	
	c. Belum Ditindaklanjuti	0 Laporan	
	d. Proses	0 Laporan	
	e. Selesai	1 Laporan	

Dari hasil penanganan saran pengaduan kepada seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Jombang, pada website SP4N – LAPOR selama 3 (tiga) bulan antara Oktober-Desember tahun 2024 ini, dapat kami simpulkan :

1. Jumlah saran dan pengaduan yang masuk di website SP4N – LAPOR adalah sebanyak 61 laporan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Saran dan pengaduan belum ditindaklanjuti : 2 laporan
 - Saran dan pengaduan masih dalam proses : 16 laporan
 - Saran dan pengaduan sudah diselesaikan : 43 laporan
2. Semua saran dan pengaduan yang masuk sudah mendapatkan tanggapan dari OPD terkait.
3. Waktu yang dibutuhkan oleh unit organisasi terkait untuk memberikan tanggapan terhadap saran dan pengaduan yang masuk bervariasi, rata-rata membutuhkan waktu selama 1.5 hari untuk menindaklanjuti saran maupun pengaduan dan masuk penanganan tindak lanjut aduan dalam kategori BAIK (<3 hari). Hal ini dikarenakan telah terlaksananya komitmen bersama dalam melaksanakan standar operasional prosedur tentang prosedur penanganan pengaduan di SP4N – LAPOR;
4. Koordinasi saran dan pengaduan yang masuk antara unit organisasi dengan unit kerja teknis terkait dibutuhkan waktu yang tidak terlalu lama.
5. Aplikasi pengaduan SP4N - LAPOR sudah tersambung ke semua unit kerja atau unit pelaksana teknis terkait.

Sementara untuk penanganan SP4N-LAPOR! selama periode Oktober – Desember 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, dapat kami simpulkan :

Jumlah laporan yang masuk ke SP4N-LAPOR! dengan rincian :

- Laporan Masuk : 1 laporan
- Belum diverifikasi : 0 laporan
- Belum ditindaklanjuti : 0 laporan
- Proses : 0 laporan
- Selesai : 1 laporan

Hasil Rekapitulasi Lapor SP4N Kabupaten Tahun 2024 meliputi sebagai berikut :

Belum Terverifikasi	: 0 Laporan
Belum Ditindaklanjuti	: 0 Laporan
Proses	: 24 Laporan
Selesai	: 558 Laporan
Tunda	: 0 Laporan
Arsip	: 40 Laporan

Laporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan KIM

Pembinaan dan Pelatihan KIM di Balai Desa Kwaron Kecamatan Diwek Jombang dengan narasumber Muhammad Mufid, Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jombang, Muchtar Bagus, Founder Join (Jombang Informasi) Media dan Ketua KIM Kwaron Diwek Saiful Muallimin dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 90 orang.

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Indikator dalam Program Aplikasi Informatika yaitu Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik dengan target 100% dan realisasi 100%

Data Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Tahun 2024

LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN :

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI	SUBDOMAIN	KETERANGAN
1	BAG ORGANISASI	BRAVO	bravo.jombangkab.go.id	Sistem Data Reformasi Birokrasi
2	BAG ORGANISASI	SUKMASANTRI	sukmasantri.jombangkab.go.id	Layanan Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jombang
3	BAG ORGANISASI	E-SAKIP	e-sakip.jombangkab.go.id	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4	BAG PBJ	SIBAJA	sibaja.jombangkab.go.id	Layanan Perencanaan Barang dan Jasa
5	BAG PBJ	SPSE	lpse.jombangkab.go.id	Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
6	BAG PEMBANGUNAN	E-MONEV	monev.jombangkab.go.id	Layanan Realisasi Anggaran
7	BAG PEMERINTAHAN	LPPD	lppd.jombangkab.go.id	Sistem Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8	BAG PEMERINTAHAN	LENTERA/LAKS AMANA	lentera.jombangkab.go.id	Layanan Elektronik Tata Pemerintahan yang terdiri dari layanan e-LPPD dan Sistem Informasi Layanan Kerjasama.
9	BAKESBANGPOL	KESBANGPOLSMART	kesbangpolmart.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat
10	BAPPEDA	E-HIBAH	e-hibah.jombangkab.go.id	Sistem usulan hibah dan bantuan sosial
11	BAPPEDA	E-LITBANG	e-litbang.jombangkab.go.id	Sistem Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDA

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI	SUBDOMAIN	KETERANGAN
12	BAPPEDA	SIPERANSINDE R	monev.jombangkab.go.id/siperansinder	Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender
13	BAPPEDA	BERKADANG	berkadang2.jombangkab.go.id/login?next_url=2023/home	Sistem Monev Berkadang
14	BAPPEDA	STUNTING	joss.jombangkab.go.id	Jombang Stop Stunting) merupakan aplikasi stunting dari P2KB Jombang yang mereview capaian stunting di wilayah kecamatan
15	BAPPEDA	E-PIPA / Jos dev	pipa.jombangkab.go.id, jos-dev.jombangkab.go.id	Sistem Pagu Indikatif Pengguna Anggaran
16	BKPSDM	SIAP ASN	siapasn.jombangkab.go.id	Layanan Kepegawaian
17	BPKAD	SILELA	silela.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Lelang Aset OPD
18	BPKAD	E-BMD	e-bmd.jombangkab.go.id	Sistem aplikasi keuangan yang digunakan untuk mengelola barang milik daerah (BMD)
19	DINAS DAGRIN	DIPUN AGEM	dipunagem-dagrin.jombangkab.go.id	Layanan Sentra Industri IKM Kabupaten Jombang
20	DINAS DIKBUD	WEB DISDIKBUD	mutasis.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Mutasi Siswa yang dibuat khusus untuk membantu proses perpindahan siswa baik masuk maupun keluar daerah Kabupaten Jombang
21	DINAS DIKBUD	WEB DISDIKBUD	eai.disdikbud.jombangkab.go.id	Layanan Arsip Ijazah dikbud
22	DINAS KESEHATAN	SIMPUS	simpus.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Manajemen Puskesmas
23	DINAS KESEHATAN	E-SPM	e-spm.dinkes.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Standar Pelayanan Minimal
24	DINAS KETAPRIK	E-BANTUAN	e-bantuan-dev.jombangkab.go.id	Aplikasi bantuan
25	DINAS KOMINFO	SAMBANG	sambang.jombangkab.go.id	Layanan Satu Data Jombang

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI	SUBDOMAIN	KETERANGAN
26	DINAS KOMINFO	SATSET	satset.jombangkab.go.id	Sistem Layanan Terintegrasi Sertifikat Elektronik
27	DINAS KOMINFO	DATA COVID	datacovid.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Data Covid-19 Kabupaten Jombang
28	DINAS KOMINFO	HELPDESK	helpdesk.jombangkab.go.id	Help Desk Pemerintah Kabupaten Jombang
29	DINAS KOMINFO	TEMPLATE SRIKANDI	template.jombangkab.go.id	Template naskah menggunakan SRIKANDI di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang
30	DINAS KOMINFO	CSIRT	csirt.jombangkab.go.id	Sistem Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Indonesia
31	DINAS KOMINFO	E-OFFICE (2023)	e-office-2023.jombangkab.go.id	Sistem Presensi dan Aktivitas TPP Pegawai Pemkab Jombang
32	DINAS KOMINFO	E-CLOUD	cloud.jombangkab.go.id	Sistem Cloud Penyimpanan Dokumen
33	DINAS KOMINFO	LAYANAN SPBE	layanan.jombangkab.go.id	Helpdesk Layanan Aplikasi

34	DINAS KOMINFO	SIMPAN	simpan.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan Pemerintah
35	DINAS KOMINFO	E-SULASH	e-sulash.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Usulan Standar Harga
36	DINAS KOMINFO	UJICOPA	ujicoba.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Usulan Standar Harga
37	DINAS KOMINFO	SSO	sso.jombangkab.go.id	Single Sign-On (SSO) adalah mekanisme autentikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai aplikasi atau layanan melalui satu kali login
38	DINAS LH	SIALI	siali.dlh.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Resik Kali
39	DINAS PERHUBUNGAN	UJI KIR	ujikir.jombangkab.go.id	Sistem Layanan Uji KIR

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI	SUBDOMAIN	KETERANGAN
40	DINAS PERKIM	SIWON	siwon.jombangkab.go.id	Sistem Informasi WC Online (SIWON)
41	DINAS PERTANIAN	E-TRAKTOR	traktor- pertanian.jombangkab.go.id	Sistem Traking dan Monitoring Data Pertanian
42	DINAS PETERNAKAN	SIPERA-SP	sipera-sp.jombangkab.go.id	Sistem Pengendalian Pemeliharaan Sarana Prasarana Aset Dinas Peternakan
43	DINAS PUPR	SIJAKI	sijaki-dev.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Jombang
44	DINAS PUPR	SIMENARA	simenara.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Menara
45	DINAS SOSIAL	INTUISI	intuisi.jombangkab.go.id	Layanan DATA PMKS dan PSKS
46	DISPORAPAR	SIKEMBANG	sikembang.jombangkab.go.i d	Sistem sarana Publikasi untuk memberikan informasi dan gambaran tentang potensi dibidang olahraga di Kabupaten Jombang
47	DPMPTSP	GIS POTENSI	gispotensi.jombangkab.go.id	Sistem Aplikasi berbasis Data Geospasial berbentuk peta digital, sebagai informasi untuk pelaku usaha maupun masyarakat, tentang POTENSI / Peluang INVESTASI di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Jombang.
48	KEC MOJOWARNO	SIGAP	sigap.jombangkab.go.id	Sistem Pelayanan Kecamatan Mojowarno
49	KEC PETERONGAN	PECELJAGUNG	pecel- jagung.jombangkab.go.id	Sistem Pelayanan Kecamatan Peterongan
50	KEC PLANDAAN	SIPADUKA	sipaduka.jombangkab.go.id	Sistem Pelayanan Kecamatan Plandaan

LAYANAN PUBLIK :

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI	SUBDOMAIN	KETERANGAN
1	DPMPD	SAPDOPALON v2.0	sabdopalon2.jombangkab.go.id	SABDOPALON menyediakan akses pada setiap warga Kabupaten Jombang untuk mendapatkan pelayanan surat secara online serta dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja dan Terintegrasi dengan data sosial masyarakat di Kabupaten Jombang (Data kesejahteraan masyarakat, Data Stunting dan Data social lainnya) yang berbasis Data kependudukan. Layanan SABDDOPALON meliputi 54 layanan.
2	DINAS LH	SILAJANG	silajang.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Laboratorium Lingkungan Jombang
3	DPMPPTSP	SIRINDUNONA	perizinan.jombangkab.go.id	Sistem Perizinan Terpadu Non Berusaha
4	BAPENDA	APP BAPENDA	bapenda.jombangkab.go.id	Sistem Layanan Wajib Pajak
5	DUKCAPIL	YAONAH	dukcapil-web.jombangkab.go.id/yaonah/daftar	Sistem Layanan Online Penduduk meliputi KTP El, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Ket Pindah (Pindah dari Jombang), Surat Ket Datang (Datang ke Jombang), Online NIK/KK, dan SKTT bagi WNA

Total :

Layanan Administrasi Pemerintahan yaitu 50 Layanan Publik yaitu 5

Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yaitu 55

- **Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah PD yang terkoneksi jaringan intranet dengan target 100% dan realisasi 100%**

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 pasal 27 mengamanatkan bahwa jaringan intra pemerintah daerah merupakan salah satu infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah. Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah. Simpul jaringan sebagaimana dimaksud terdiri dari : (1) Perangkat daerah (termasuk kantor, kecamatan, kantor kelurahan dan kantor unit pelaksana teknis; (2) Satuan Pendidikan; (3) Pemerintah Desa; (4) Instansi Pemerintahan/publik strategis lainnya.

Dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Nomor : 188/188/415.23/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, Jaringan Intra diselenggarakan oleh Dinas Kominfo yang menggunakan penyedia jasa akses internet sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2023 Jaringan Intra sudah terhubung pada seluruh OPD di Kabupaten Jombang sehingga target 100% telah tercapai pada indikator ini.

**REKAPITULASI DATA BANDWITH PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET PEMERINTAH YANG BERKUALITAS
DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMINFO KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	BANDWITH (FIBER OPTIC 100 Mbps) dan (BACKUP BROADBAND 100bps)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	200 Mbps
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	200 Mbps
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	200 Mbps
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	200 Mbps
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	200 Mbps
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	200 Mbps
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	200 Mbps
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200 Mbps
9	DINAS PERHUBUNGAN	200 Mbps
10	DINAS PERTANIAN	200 Mbps
11	DINAS PETERNAKAN	200 Mbps
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	200 Mbps
13	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	200 Mbps
14	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	200 Mbps

NO	PERANGKAT DAERAH	BANDWIDTH (FIBER OPTIC 100 Mbps) dan (BACKUP BROADBAND 100bps)
15	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	200 Mbps
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	200 Mbps
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	200 Mbps
18	DINAS TENAGA KERJA	200 Mbps
19	DINAS SOSIAL	200 Mbps
20	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200 Mbps
21	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	200 Mbps
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	200 Mbps
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	200 Mbps
24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	200 Mbps
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	200 Mbps
26	DINAS KESEHATAN	200 Mbps
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	200 Mbps
28	INSPEKTORAT	200 Mbps
29	KECAMATAN JOMBANG	40 Mbps
30	KECAMATAN TEMBELANG	40 Mbps
31	KECAMATAN PLANDAAN	40 Mbps
32	KECAMATAN PLOSO	40 Mbps
33	KECAMATAN KABUH	40 Mbps
34	KECAMATAN KUDU	40 Mbps
35	KECAMATAN NGUSIKAN	40 Mbps
36	KECAMATAN KESAMBEN	40 Mbps
37	KECAMATAN PETERONGAN	40 Mbps
38	KECAMATAN MOJOAGUNG	40 Mbps
39	KECAMATAN SUMOBITO	40 Mbps
40	KECAMATAN MOJOWARNO	40 Mbps
41	KECAMATAN BARENG	40 Mbps
42	KECAMATAN WONOSALAM	40 Mbps
43	KECAMATAN NGORO	40 Mbps
44	KECAMATAN GUDO	40 Mbps
45	KECAMATAN PERAK	40 Mbps
46	KECAMATAN BANDARKEDUNG Mulyo	40 Mbps

NO	PERANGKAT DAERAH	BANDWITH (FIBER OPTIC 100 Mbps) dan (BACKUP BROADBAND 100bps)
47	KECAMATAN MEGALUH	40 Mbps
48	KECAMATAN DIWEK	40 Mbps
49	KECAMATAN JOGOROTO	40 Mbps
50	SEKRETARIAT DAERAH	40 Mbps
51	SEKRETARIAT DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	40 Mbps
52	RSUD JOMBANG	40 Mbps
53	RSUD PLOSO	40 Mbps
Total		2000Mbps/2 Gb

Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target 1 dokumen dan realisasi 100% yaitu 1 dokumen pelaksanaan sub domain yang sesuai dengan standart.

Indikator ini mengacu pada Permen Kominfo No. 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara bahwa domain utama di Pemerintahan Kabupaten Jombang yaitu jombangkab.go.id, sedangkan subdomain yaitu namaaplikasi/opd.jombangkab.go.id. Target 100% merupakan Penetapan Sub Domain Website Pemerintah Kabupaten Jombang dan nama email resmi dengan domain jombang.kab.go.id, maka bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang akan membuat/membangun website atau aplikasi sistem informasi berbasis web dapat mengajukan permohonan subdomain sekaligus hosting dan email resmi kepada Dinas KOMINFO Kabupaten Jombang sesuai dengan regulasi Perbup Jombang No 15 Tahun 2021 Tentang SPBE dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Nomor : 188/188/415.23/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.

**REKAPITULASI DATA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
YANG MEMILIKI PORTAL DAN SITUS WEB SESUAI STANDART TAHUN 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	PLATFORM	NAMA WEB SESUAI STANDART
1	2	3	4
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	WEBSITE	bkpsdm.jombangkab.go.id
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	WEBSITE	bapenda.jombangkab.go.id
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	WEBSITE	bpkad.jombangkab.go.id
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	WEBSITE	bappeda.jombangkab.go.id
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	WEBSITE	bpbd.jombangkab.go.id
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	WEBSITE	bakesbangpol.jombangkab.go.id
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	WEBSITE	dpmpstsp.jombangkab.go.id
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	WEBSITE	kominfo.jombangkab.go.id
9	DINAS PERHUBUNGAN	WEBSITE	dishub.jombangkab.go.id
10	DINAS PERTANIAN	WEBSITE	pertanian.jombangkab.go.id
11	DINAS PETERNAKAN	WEBSITE	peternakan.jombangkab.go.id
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	WEBSITE	dkpp.jombangkab.go.id
13	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	WEBSITE	disdagrin.jombangkab.go.id
14	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	WEBSITE	dinkopum.jombangkab.go.id
15	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	WEBSITE	disporapar.jombangkab.go.id
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	WEBSITE	dikbud.jombangkab.go.id
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	WEBSITE	dpmpd.jombangkab.go.id
18	DINAS TENAGA KERJA	WEBSITE	disnaker.jombangkab.go.id
19	DINAS SOSIAL	WEBSITE	dinsos.jombangkab.go.id
20	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	WEBSITE	pupr.jombangkab.go.id
21	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	WEBSITE	perkim.jombangkab.go.id
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	WEBSITE	dlh.jombangkab.go.id
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	WEBSITE	dispersip.jombangkab.go.id
24		WEBSITE	dppkb-pppa.jombangkab.go.id

	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK		
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	WEBSITE	dukcapil.jombangkab.go.id
26	DINAS KESEHATAN	WEBSITE	dinkes.jombangkab.go.id
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	WEBSITE	satpolpp.jombangkab.go.id
28	INSPEKTORAT	WEBSITE	inspektorat.jombangkab.go.id
29	KECAMATAN JOMBANG	WEBSITE	jombang.jombangkab.go.id
30	KECAMATAN TEMBELANG	WEBSITE	tembelang.jombangkab.go.id
31	KECAMATAN PLANDAAN	WEBSITE	plandaan.jombangkab.go.id
32	KECAMATAN PLOSO	WEBSITE	ploso.jombangkab.go.id
33	KECAMATAN KABUH	WEBSITE	kabuh.jombangkab.go.id
34	KECAMATAN KUDU	WEBSITE	kudu.jombangkab.go.id
35	KECAMATAN NGUSIKAN	WEBSITE	ngusikan.jombangkab.go.id
36	KECAMATAN KESAMBEN	WEBSITE	kesamben.jombangkab.go.id
37	KECAMATAN PETERONGAN	WEBSITE	peterongan.jombangkab.go.id
38	KECAMATAN MOJOAGUNG	WEBSITE	mojoagung.jombangkab.go.id
39	KECAMATAN SUMOBITO	WEBSITE	sumobito.jombangkab.go.id
40	KECAMATAN MOJOWARNO	WEBSITE	mojowarno.jombangkab.go.id
41	KECAMATAN BARENG	WEBSITE	bareng.jombangkab.go.id
42	KECAMATAN WONOSALAM	WEBSITE	wonosalam.jombangkab.go.id
43	KECAMATAN NGORO	WEBSITE	ngoro.jombangkab.go.id
44	KECAMATAN GUDO	WEBSITE	gudo.jombangkab.go.id
45	KECAMATAN PERAK	WEBSITE	perak.jombangkab.go.id
46	KECAMATAN BANDAR KEDUNG Mulyo	WEBSITE	bandarkedungmulyo.jombangkab.go.id
47	KECAMATAN MEGALUH	WEBSITE	megaluh.jombangkab.go.id
48	KECAMATAN DIWEK	WEBSITE	diwek.jombangkab.go.id
49	KECAMATAN JOGOROTO	WEBSITE	jogoroto.jombangkab.go.id
50	SEKRETARIAT DAERAH	WEBSITE	setda.jombangkab.go.id
51	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	WEBSITE	dprd.jombangkab.go.id
52	RSUD JOMBANG	WEBSITE	rsudjombang.jombangkab.go.id
53	RSUD PLOSO	WEBSITE	rsudploso.jombangkab.go.id

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yaitu target 1 sistem dan Realisasi 1 sistem yaitu 100%.

Penerapan Sistem Informasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Jombang membutuhkan kecepatan dalam pengelolaan data dan informasi melalui infrastruktur teknologi informasi melalui koneksi jaringan intra pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Kondisi eksisting jaringan intra fiber optic yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu ada di antar OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, lokasi – lokasi penempatan CCTV di lokasi strategis dan lokasi – lokasi wifi gratis sebagai sarana penyebarluasan informasi pembangunan di Kabupaten Jombang yang memiliki sistem jaringan internet fiber optic.

LAPORAN PENYEDIAAN JARINGAN INTERNET

NO	PERANGKAT DAERAH /UNIT KERJA	LAYANAN	BANDWITH		KET	NO LAYANAN (SID)	
I	1	PEMKAB JOMBANG / KOMINFO	IP TRANSIT	2	GBPS	AO	1727080421
	TOTAL IP TRANSIT						
II	1	TAMAN KEBON RATU	WIFI MANAGE SERVICE (WMS)	100	MBPS	AO	1917048479
	2	TAMAN INFORMASI	WIFI MANAGE SERVICE (WMS)	100	MBPS	AO	1916900489
	3	TAMAN KEBON ROJO	WIFI MANAGE SERVICE (WMS)	100	MBPS	AO	1916976081
	4	PLAYGROUD ALONALON	WIFI MANAGE SERVICE (WMS)	100	MBPS	AO	1916433593
	5	TAMAN DEPAN CAPIL	WIFI MANAGE SERVICE (WMS)	100	MBPS	AO	1917292090
TOTAL WMS							
III	1	DISDIKBUD	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212829
	2	DINKES	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212834
	3	DINAS PUPR	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212822
	4	DINAS PERKIM	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212823
	5	SATPOL PP	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212520
	6	BPBD	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318284598
	7	DINSOS	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212133
	8	DISNAKER	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212809
	9	DKPP	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212826
	10	DLH	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212138
	11	DISDUKCAPIL	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212810
	12	DPMD	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212831
	13	DPPKB-PPPA (KANTOR PUSAT)	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212837
	14	DISHUB	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212541
	15	DISKOMINFO (SJFM)	HSI (INDIBIZ)	200	MBPS	MO	152318212811
	16	DINKOPUM	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212765
	17	DPMPTSP	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212838
	18	DISPORAPAR	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212844
	19	DISPERSIP (PERPUSTAKAAN MASTRIP)	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212835
	20	DISPERSIP (BIDANG ARSIP)	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212813
	21	DISPERTA	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212827
	22	DISNAK	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212828
	23	DISDAGRIN	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212814
	24	SEKRETARIAT DPRD	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212815
	25	BAPPEDA	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212816
	26	BPKAD	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212817

27	BAPENDA	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212818
28	BKPSDM	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212820
29	INSPEKTORAT	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212846
30	BAKESBANGPOL	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212848
31	KELURAHAN JELAKOMBO	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212534
32	KELURAHAN JOMBATAN	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212851
33	KELURAHAN KALIWUNGU	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212852
34	KELURAHAN KEPANJEN	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212853
35	PENDOPO KABUPATEN	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212542
36	PENDOPO KABUPATEN (KANTOR SEKPR	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212855
37	ALUN-ALUN	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212856
38	LAPANGAN PEMKAB/MASJID	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212821
39	PASAR PERAK	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249821
40	BAGIAN UMUM	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249040
41	BAGIAN KESRA	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318243888
42	BAGIAN PEMBANGUNAN	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318242167
43	BAGIAN ORGANISASI	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318248607
44	BAGIAN PEMERINTAHAN	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249304
45	BAGIAN PROKOPIM	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249306
46	BAGIAN PBJ	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249307
47	BAGIAN HUKUM	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318248606
48	BAGIAN PEREKONOMIAN	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249308
49	BAGIAN RENKEU	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318248610
50	KODIM	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318287441
51	PN	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318282829
52	KEJAKSAAN	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318284116
53	LAPAS	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318281941
54	SEKPRI WABUP	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249291
55	SEKPRI SEKDA	HSI (INDIBIZ)	200	MBPS	AO	152318249656
56	SEKPRI BUPATI	HSI (INDIBIZ)	200	MBPS	AO	152318249469
57	ASISTEN	HSI (INDIBIZ)	200	MBPS	AO	152318249470
58	DISHUB (UJI KIR)	HSI (INDIBIZ)	200	MBPS	AO	152318249284
59	DISHUB (PJU)	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249460
60	PMK PLOSO	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152333210521
61	PMK MOJOAGUNG	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152319217006
62	PMK NGORO	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152322202265
63	UPT METROLOGI (PETERONGAN)	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318248104
64	PKK	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249826
65	SWAGATA	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249827
66	RUMAH DINAS BUPATI	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249829
67	RUMAH DINAS WABUP	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318248959
68	RUMAH DINAS SEKDA	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249831
69	UPT LAB DLH	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249832
70	DISKOMINFO (KANTOR PUSAT)	HSI (INDIBIZ)	200	MBPS	MO	152318212832
71	JCC	HSI (INDIBIZ)	200	MBPS	MO	152318285578
72	R. RAPAT BUNG TOMO	HSI (INDIBIZ)	200	MBPS	AO	152318240195
73	R. RAPAT SOERO	HSI (INDIBIZ)	200	MBPS	AO	152318248556
74	R. RAPAT AULA BESUT	HSI (INDIBIZ)	200	MBPS	AO	152318249467
75	PEMKAB JOMBANG / KOMINFO	NETMONK PRIME	1	DEVICE	AO	

	1	PEMKAB JOMBANG / KOMINFO	ACCESS POINT RUIJIE RG-AP720-L	75	UNIT	AO	
	2	PEMKAB JOMBANG / KOMINFO	ACCESS POINT RUJIE RG-AP820-L	5	UNIT	AO	
	3	PEMKAB JOMBANG / KOMINFO	MIKROBIT SFP+ 10G LH SM 10KM 1310NM	1	UNIT	AO	
	4	PEMKAB JOMBANG / KOMINFO	MIKROTIK ROUTER CCR2116-12G-4S+	1	UNIT	AO	
	5	PEMKAB JOMBANG / KOMINFO	ENGINEER ON SITE	1	ORANG	AO	
	6	PEMKAB JOMBANG / KOMINFO	MAINTENANCE FIBER OPTIK	1	PAKET	AO	

Kegiatan 2 pada Program Aplikasi Informatika yaitu Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi target 2 aplikasi dan realisasi 2 aplikasi.

Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen. Target 2 dokumen yaitu 1 dokumen penatalaksanaan dan pengawasan dokumen yaitu realisasi Dokumen SPBE tentang SPLP & Pusat dan Jaringan Intra.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dengan indikator Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola target 1 unit dengan realisasi 1 unit yaitu 100%.

Indikator ini merupakan standarisasi yang diberlakukan oleh Permen Komdigi terkait standar pusat data yang harus diterapkan pada lingkungan Pemerintah Daerah. Terdapat satu pusat data di Kabupaten Jombang yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Realisasi pemenuhan pusat data sesuai dengan target yaitu 77 indikator standarisasi yang diterapkan oleh Kementerian Komdigi.

Standarisasi Pusat Data Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
1	Pusat data aman dari bencana, mudah diakses dan mudah melakukan pengembangan/pembangunan		√	
2	Perancangan dan pembangunan pusat data sesuai dengan standar topologi yang dipilih sesuai kebutuhan	√		
3	Penyediaan jalur supply utility dan logistik	√		

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
4	Penyediaan bandwidth untuk komunikasi yang diperlukan dan memiliki jalur alternatif guna menghindari kepadatan lintas data serta mencegah kegagalan satu jalur	√		
5	Penyediaan sistem monitoring lingkungan pusat (temperatur, kelembapan, asap, kebakaran, kebocoran air, dan tegangan listrik)	√		
6	Mempunyai dan menjalankan standar operasional prosedur untuk operasi dan perawatan	√		
7	Memiliki rencana keberlangsungan usaha dan rencana pemulihan bencana yang komprehensif serta proses pemulihan bencana yang cepat dan adaptif		√	
8	Ruang masuk yang dipakai sebagai antar-muka antara sistem pengkabelan pusat data dan pengkabelan antar bangunan	√		
9	Lokasi untuk perangkat penyedia akses dan titik demarkai dan juga antar muka dengan sistem pengkabelan	√		
10	Area distribusi utama (lokasi main cross connect, router inti dan switches untuk infrastruktur LAN dan SAN)	√		
11	Area distribusi horizontal (lokasi distribusi untuk pengkabelan ke area distribusi perangkat)	√		
12	Area distribusi perangkat (ruang yang dialokasikan untuk perangkat akhir termasuk sistem komputer dan perangkat telekomunikasi)	√		
13	Area distribusi zona (terletak antara area distribusi horizontal dan area distribusi perangkat)	√		
14	Lokasi bangunan berada pada lokasi yang aman bencana alam dan mempunyai akses jalan yang cukup dan fasilitas parkir	√		
15	Bangunan ruang komputer tidak berada di bawah area perpipaan kecuali memiliki sistem pengendali air	√		
16	Jendela ruang komputer yang menghadap ke sinar matahari ditutup	√		
17	Memiliki area bongkar muat yang memadai untuk menangani penghantaran barang/peralatan	√		
18	Memiliki sistem pengkondisian udara, proteksi kebakaran, kelistrikan yang sama dengan standar ruang komputer		√	
19	Kontrol akses memiliki pengamanan fisik disetiap jendela yang memungkinkan akses langsung ke pusat data	√		
20	Setiap sumber daya manusia di pusat data memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup terhadap keamanan fisik pusat data	√		
21	Pengamanan pusat data selama 24 jam dengan jumlah petugas paling sedikit 2 orang per shift		√	
22	Terdapat perangkat sistem pemantau visual yang berfungsi untuk memantau dan merekam	√		
23	Menggunakan sistem akses elektronik dan sistem pengawasan yang dikendalikan dengan mekanisme otentikasi	√		
24	Setiap tamu/pengunjung memiliki izin dan dilengkapi dengan tanda masuk serta tanda penhenal untuk dapat masuk		√	
25	Jumlah dan lokasi pintu darurat kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	√		
26	Pintu darurat kebakaran harus dapat dibuka kearah luar	√		
27	Lampu darurat dan tanda keluar diletakkan pada lokasi sesuai ketentuan		√	
28	Lampu darurat, tanda keluar darurat, dan titik kumpul darurat diletakkan pada lokasi sesuai ketentuan		√	

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
29	Dinding dan pintu ke ruang komputer, ruang mekanikal dan kelistrikan, ruang telekomunikasi dan kawasan kritikal lainnya memiliki tingkat terbakar (fire-rating) sesuai dengan peraturan		√	
30	Ruang komputer diproteksi dengan sistem pemadam kebakaran dan deteksi asap		√	
31	Seluruh sistem deteksi asap bangunan diintegrasikan ke satu alarm bersama		√	
32	Sistem pemadam kebakaran otomatis diaktifkan secara manua		√	
33	Tersedia catatan pemeliharaan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan deteksi api dan pemadaman untuk keperluan pemeriksaan		√	
34	Tersedia bukti pelatihan staf pada simulasi pengendalian kebakaran		√	
35	Pemadam kebakaran ditempatkan sesuai ketentuan peraturan		√	
36	Semua tanda peringatan kebakaran ditempatkan pada posisinya sesuai ketentuan peraturan		√	
37	Seluruh sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran didesain dan dipasang oleh petugas yang memiliki kualifikasi dan didesain sesuai standar internasional/nasional atau regulasi nasional		√	
38	Bangunan dilengkapi dengan sistem proteksi petir		√	
39	Kabel daya masuk ke dalam bangunan dan diterminasi di ruang penyambungan listrik yang andal yang berisikan seluruh penyambungan dan pengukuran yang penting		√	
40	Daya yang tersedia dari penyedia listrik utama paling sedikit 20% lebih besar dari proyeksi beban puncak dimana pusat data berada		√	
41	Tersedia catu daya listrik alternatif (seperti generator) dengan kapasitas yang memadai untuk operasional pusat data paling sedikit 6 (enam) jam selama kejadian gangguan listrik utama		√	
42	Perangkat pusat data harus diproteksi dengan UPS atau catu daya cadangan lainnya		√	
43	Kapasitas penyimpanan energi UPS atau catu daya cadangan lainnya memadai untuk memasok beban pusat data sehingga cukup waktu bagi catu daya alternatif mencapai keadaan tunak (steady state) untuk memikul beban pusat data		√	
44	Kapasitas UPS lebih besar dari proyeksi beban puncak perangkat pusat data. Kapasitas beban rata-rata tidak lebih besar dari 80% kapasitas UPS		√	
45	UPS memiliki sistem pelaporan dan pemantauan kinerja serta sistem peringatan		√	
46	Ruang pusat data memiliki terminal pbumian (grounding) tembaga kurang dari 1 Ohm	√		
47	Ruang komputer dijaga dan dikendalikan temperatur dengan suhu antara 18-24 °C	√		
48	Ruang komputer dijaga dan dikendalikan kelembaban ruangnya dengan kelembaban antara 50-55%	√		
49	Peralatan pengkondisian udara dihubungkan ke catu daya utama dan didukung oleh catu daya alternatif		√	
50	Seluruh pengkabelan interior dengan tipe tidak mudah terbakar		√	
51	Setiap rak memiliki akses ke sistem saluran kabel, di atas atau di bawahnya, yang memungkinkan kabel-kabel dapat ditata secara baik antar rak	√		

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
52	Kabel daya satu fase dan kabel data tembaga harus dipisahkan paling sedikit 20 (dua puluh) cm	√		
53	Kabel daya tiga fase dan kabel data tembaga harus dipisahkan paling sedikit 60 (enam puluh) cm	√		
54	Kabel yang melewati dinding dilindungi terhadap bahaya api sesuai ketentuan peraturan		√	
55	Kabel tidak diletakkan di pintu, lantai, atau digantung antar rak		√	
56	Setiap kabel memiliki label identifikasi yang unik pada kedua ujung awal dan akhir		√	
57	Setiap rak peralatan memiliki label identifikasi		√	
58	Kabel input telekomunikasi eksternal dihubungkan di area atau ruang telekomunikasi tersendiri		√	
59	Kabel komunikasi tembaga dari luar gedung diproteksi dengan peredam tegangan lebih sebelum ke ruang komputer		√	
60	Memiliki komponen kapasitas dasar dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sesuai kebutuhan		√	
61	Memiliki tingkat availability 99,671%		√	
62	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 28,8 jam pertahun		√	
63	Memiliki komponen kapasitas redundan dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sesuai kebutuhan		√	
64	Memiliki tingkat availability 99,749%		√	
65	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 22 jam pertahun		√	
66	Memiliki komponen kapasitas redundan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal pusat data tanpa harus mematikan operasi pusat data. Satu jalur distribusi tersebut dalam kondisi aktif dan satu jalur distribusi lainnya dalam kondisi siaga (standby).		√	
67	Memiliki kemampuan untuk mendeteksi kegagalan, mengisolasi dampak kegagalan dan melakukan perawatan sehingga layanan pusat data tetap bekerja dengan baik		√	
68	Memiliki tingkat availability 99,982%		√	
69	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 1,6 jam pertahun		√	
70	Memiliki komponen kapasitas redundan dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal pusat data tanpa harus mematikan operasi pusat data. Kedua jalur distribusi tersebut dalam kondisi aktif.		√	
71	Memiliki tingkat availability 99,995%		√	
72	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 2.4 menit pertahun.		√	
73	Memastikan power management berjalan dengan baik		√	
74	Memastikan desain dan manajemen aliran udara dan sistem pendingin berjalan dengan baik		√	

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
75	Memastikan peralatan mekanik dan elektrik bekerja pada rentang optimum operasi baik dalam hal rentang daya dan rentang temperatur		√	
76	Menggunakan peralatan TIK dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan dan power density Pusat Data, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan pengembangan Pusat Data ke depannya		√	
77	Mengintegrasikan kontrol optimasi manajemen energi pada seluruh peralatan TIK dan keseluruhan fasilitas Pusat Data		√	

Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika juga melaksanakan audit ISO 27001:2002 terkait standar keamanan pada pusat data yang ada pada Dinas Kominfo dengan hasil sebagai berikut :

1. Selama proses audit, beberapa auditee belum memahami pemetaan dokumen dan dokumen yang digunakan dalam ruang lingkup proses terkait, hal ini terlihat dari kekurangan auditee terhadap dokumen yang harus disiapkan.
2. Kegiatan korektif auditee akan ditinjau oleh auditor dan dipantau oleh manajemen puncak selama tinjauan manajemen berikutnya.
3. Tim SMKI harus disesuaikan dengan tupoksi per orang sebagai contoh yang melakukan pekerjaan SMKI hanya sebagian orang;
4. Melakukan sosialisasi kebijakan terhadap semua OPD terkait keamanan informasi;
5. Membuat perjanjian terkait keamanan informasi dengan vendor atau penyedia eksternal;
6. Melakukan pendataan aset di pusat data;
7. Pengadaan CCTV di ruang server untuk monitoring aset penting di Pusat Data;
8. Hak Akses Istimewa perlu dibatasi, sehingga super admin tidak memiliki 100% akses terhadap sistem;
9. Perlu adanya pengadaan fasilitas Disaster Recovery Center;
10. Melakukan konfigurasi terkait pembatasan penggunaan USB di setiap perangkat yang berhubungan dengan proses bisnis;
11. Melakukan pencatatan terkait log aktivitas dan review log akses;
12. Melakukan pencatatan terkait serangan siber di form rekap untuk membuat lesson learned;
13. Memastikan kesesuaian jenis APAR yang digunakan di Pusat Data serta tanggal kadaluarsanya;
14. Pemetaan kontrol akses fisik, informasi, dan virtual;

15. Pengadaan infografis terkait akses fisik seperti pengadaan infografis dilarang merokok, makan, minum, dan melakukan aktivitas pengambilan gambar di zona terbatas

Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan target 2 unit dengan realisasi 100% yaitu aplikasi Jombang Stop Stunting pada stunting.jombangkab.go.id dan pengembangan pada website jombangkab.go.id

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dengan indikator Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan target 2 layanan berupa realisasi aplikasi JDIH pada portal API dan integrasi layanan SSO dengan monev.jombangkab.go.id dan e-office.jombangkab.go.id

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan indikator Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City target 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen rencana pengembangan call center dan penyelenggaraan operasional pemeliharaan call center 112.

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah target 1 dokumen berupa kegiatan Fasilitas Relawan TIK. Relawan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Kabupaten Jombang telah dilaksanakan pelantikan pada tanggal 21 Februari 2025 yang bertugas untuk menjalankan program-program edukasi, sosialisasi, dan pengembangan keterampilan TIK untuk masyarakat, termasuk pelatihan literasi digital, pendampingan UMKM dalam transformasi digital, serta kampanye edukasi terkait keamanan data dan etika bermedia sosial.

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL dengan indikator Persentase Data Sektoral yang telah dipublikasikan dengan target 100% telah terealisasi 100%. Seluruh data telah dipublikasikan pada portal sambang.jombangkab.go.id meliputi 9529 data, 33 urusan, 63 produsen dan 33 publikasi

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah data statistik sektoral yang digunakan dalam portal satu data yaitu 28 data sektoral telah tercapai 100% meliputi :

No	Nama Variabel	Definisi	Referensi Waktu
1	Geografi	Studi tentang lokasi, bentuk, dan karakteristik fisik suatu wilayah, termasuk analisis sumber daya dan kondisi alam.	2019-2024
2	Demografi	Analisis data penduduk terkait jumlah, distribusi, kepadatan, serta komposisi usia dan jenis kelamin.	2019-2024
3	Perekonomian Daerah	Kajian mengenai kondisi ekonomi di suatu wilayah, mencakup tingkat pendapatan, lapangan kerja, dan sektor produktif.	2019-2024
4	Keuangan Daerah	Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang mencakup pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan untuk pembangunan.	2019-2024
5	Pendidikan	Usaha peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui fasilitas, tenaga pengajar, dan kurikulum yang sesuai.	2019-2024
6	Kesehatan	Penyediaan layanan kesehatan yang mencakup fasilitas, tenaga medis, dan program kesehatan masyarakat.	2019-2024
7	PUPR	Pengelolaan pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, serta tata ruang kota dan wilayah.	2019-2024
8	Perumahan dan Permukiman	Penyediaan hunian yang layak dan pengaturan kawasan permukiman agar lebih tertata dan nyaman.	2019-2024
9	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penjagaan keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.	2019-2024
10	Tenaga Kerja	Pengembangan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja serta perlindungan hak-hak pekerja tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja	2019-2024
11	Pemberdayaan Perempuan	Upaya peningkatan peran dan kontribusi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.	2019-2024
12	Perlindungan Anak	Pemberian perlindungan terhadap anak dari kekerasan serta pemenuhan hak-hak dasar mereka.	2019-2024
13	Pangan	Usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi masyarakat.	2019-2024
14	Pertanahan	Pengelolaan tanah untuk keperluan pembangunan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan secara teratur.	2019-2024
15	Lingkungan Hidup	Perlindungan terhadap lingkungan dan pelestarian alam untuk mencegah kerusakan atau polusi.	2019-2024

No	Nama Variabel	Definisi	Referensi Waktu
16	Administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil	Pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil seperti kelahiran, kematian, dan status kependudukan.	2019-2024
17	Pemberdayaan Masyarakat	Program peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal.	2019-2024
18	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program pengendalian pertumbuhan penduduk dan pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup.	2019-2024
19	Perhubungan	Pengelolaan dan pengembangan Infrastruktur transportasi serta pelayanan publik di bidang transportasi.	2019-2024
20	Komunikasi dan Informatika	Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk Mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi.	2019-2024
21	Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk meningkatkan ekonomi lokal dan kemandirian ekonomi masyarakat.	2019-2024
22	Penanaman Modal	Pengelolaan investasi dari dalam dan luar negeri untuk mendukung Pertumbuhan ekonomi daerah.	2019-2024
23	Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan potensi pemuda dan olahraga untuk meningkatkan kesehatan, prestasi, dan kreativitas.	2019-2024
24	Kebudayaan	Pelestarian dan pengembangan warisan budaya sertapeningkatan kesadaran budaya masyarakat.	2019-2024
25	Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan perpustakaan dan arsip untuk penyimpanan informasi dan sejarah serta mendukung pendidikan.	2019-2024
26	Pariwisata	Pengembangan destinasi wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan kontribusi pada ekonomi lokal.	2019-2024
27	Pertanian	Pengelolaan sektor pertanian untuk memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.	2019-2024
28	Kehutanan	Pelestarian dan pengelolaan sumber daya hutan untuk mendukung lingkungan yang berkelanjutan.	2019-2024
29	Perdagangan	Pengaturan dan fasilitasi perdagangan dalam negeri untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang.	2019-2024
30	Perindustrian	Pengembangan sektor industri untuk meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja.	2019-2024
31	Perikanan	Pengelolaan sumber daya perikanan untuk keberlanjutan dan kesejahteraan nelayan.	2019-2024
32	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi kerja.	2019-2024

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan indikator Jumlah Dokumen Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor dan target 2 dokumen meliputi : Dokumen Penyusunan Infografis Data Statistik Sektor sesuai dengan 28 data sektoral dan Indeks Kematangan TIK dan I-PIKP.

Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektor dengan indikator Jumlah Metadata Statistik Sektor yang Dihimpun dan target 1 dokumen. Kegiatan metadata berupa Sosialisasi dan Pendampingan Penginputan Metadata Indikator dan Metadata Variabel pada Aplikasi <https://indah.bps.go.id>. Sebagai wujud pelaksanaan Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Badan Pusat Statistik memberikan perhatian penuh dengan membangun aplikasi INDAH (Indonesia Data Hub). Aplikasi tersebut merupakan sebuah sistem statistik terintegrasi yang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan kualitas kegiatan statistik. Platform tersebut menyediakan layanan yang dapat digunakan untuk system lain. Aplikasi INDAH dibangun sebagai data solution platform yang menerapkan prinsip-prinsip SDI.

Pengumpulan metadata ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah. Metadata adalah informasi yang terstruktur dan terstandar untuk menggambarkan, menjelaskan, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan data. Melalui aplikasi INDAH BPS (indah.bps.go.id), pengumpulan metadata dilakukan secara langsung dengan fokus pada Data Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan perangkat daerah dapat menyediakan data secara rutin dan akurat setiap tahun. Metadata yang dikumpulkan akan membantu dalam meningkatkan kualitas tata kelola data dan informasi, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur dengan indikator Jumlah Infrastruktur Statistik dengan target 1 unit berupa pengembangan dalam Portal Sambang,jombangkab.go.id.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektor di Daerah dengan indikator Jumlah Data Statistik Sektor yang Dihimpun dan target 1 dokumen. Kegiatan Forum Satu Data Indonesia dalam rangka monitoring kegiatan satu data yang dilaksanakan setiap tribulan.

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Indikator Persentase Sistem Aplikasi Strategis yang berfungsi dengan baik. Indikator pada program ini merupakan sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik dengan target 50% dan realisasi 50% dengan capaian 100%.

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan layanan keamanan informasi dengan target 53 perangkat daerah, realisasi 53 perangkat daerah dengan capaian 100%.

Sertifikat elektronik pada sistem elektronik merupakan salah satu cara memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik dalam mendukung tata pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik melalui tanda tangan elektronik yang didaftarkan pada BSSN (Badan Sandi Siber Negara). Rencana kerja yang telah terlaksana pada indikator ini adalah :

- Mengkoordinasikan pendaftaran sertifikat elektronik pada seluruh perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Salah satu bentuk pengamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Jombang adalah melalui sertifikat elektronik (tanda tangan elektronik tersertifikasi/TTE) pada dokumen yang dihasilkan oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam rangka meningkatkan keamanan informasi pada dokumen Pemerintah Kabupaten Jombang serta mendukung penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Jombang, maka bulan Nopember 2022 ditetapkan penggunaan aplikasi Srikandi yang dilengkapi dengan TTE untuk seluruh dokumen administrasi Pemerintahan Kabupaten Jombang. Tahun 2023 total pengusulan TTE sejumlah 1082 (sertifikat BSrE) Kepala dan Sekretaris Perangkat Daerah serta Kepala UPT. Untuk mendukung layanan TTE telah diwujudkan inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang diberi nama SATSET (Sistem Layanan Terintegrasi Sertifikat Elektronik). Pemohon dan Pengguna TTE dapat mendapatkan layanan pengusulan, pembaharuan, pencabutan, perpanjangan dan pengaduan secara online dengan aplikasi SATSET, sehingga proses pelayanan tidak terbatas ruang dan waktu.

Melaksanakan Kerjasama penyusunan Assesment Keamanan Informasi dan mengkoordinasikan pemanfaatan hasil. Untuk mewujudkan sistem elektronik yang aman, maka perlu dilaksanakan beberapa indikator-indikator dari

rangkaian pengujian tingkat kemanan pada skala daerah melalui pengukuran Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) dan pada skala aplikasi melalui penetrasi test. Kegiatan pengujian tersebut melalui Kerjasama dengan pihak ketiga berbentuk assessment keamanan informasi. Proses pengujian melibatkan tim teknis dan perangkat daerah terkait, khususnya pengelola aplikasi strategis. Dari 3 aplikasi strategis layanan Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu :

1. siapasn.jombangkab.go.id (BKPSDM),
2. bapenda.jombangkab.go.id (Bapenda) dan
3. e-audit.jombangkab.go.id (Inspektorat).

Mengkoordinasikan dokumen persandian dari aplikasi SANAPATI. Salah satu bentuk pengamanan informasi dari Pusat sampai dengan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) untuk dokumen administrasi pemerintahan, telah diselenggarakan pengelolaan informasi dari Kementerian/Lembaga Negara yang diinformasikan kepada Kepala Daerah dikirim melalui aplikasi SANAPATI. Seluruh dokumen dari aplikasi Sanapati telah diinformasikan kepada Kepala Daerah secara tepat waktu.

Target pada kegiatan ini yaitu 100%, pada tahun 2024 realisasi tercapat sesuai dengan target.

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan berupa 1 dokumen penyusunan SK Agen CSIRT

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non elektronik

Indikator : Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik dengan target 1 dokumen dengan realisasi 100% berupa Laporan Penyelenggaraan Persandian berupa pengelolaan berita sanapati.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi dengan target 53 Perangkat Daerah dengan realisasi 53 perangkat atau capaian 100%. Kegiatan ini juga dilaksanakannya Sosialisasi Agen Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Pemerintah

Kabupaten Jombang dan Laporan Penetration Test. Kegiatan rapat pembahasan Penetration Test menggunakan metode black box, dimana tujuan dari metode adalah untuk memberikan penilaian keamanan yang lebih efisien. dengan memiliki sejumlah informasi, penguji dapat menguji sistem keamanan dan mensimulasikan serangan. Dari semua aplikasi di Pemerintah Kabupaten Jombang, terdapat 3 aplikasi yang harus segera dilakukan perbaikan dari sisi keamanan, yaitu

1. siapasn.jombangkab.go.id (BKPSDM),
2. bapenda.jombangkab.go.id (Bapenda) dan
3. e-audit.jombangkab.go.id (Inspektorat).

Pelaksanaan perbaikan akan dilakukan oleh OPD pemilik aplikasi berdasarkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Setelah perbaikan akan dilaksanakan remediasi penetration test pada aplikasi tersebut. Dari kegiatan Assasement Keamanan Teknologi Informasi ini diharapkan tercapainya peningkatan keamanan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Jombang.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%) (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun Sesuai Aturan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024			3	3	100		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024			5	5	100		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024			32	32	100		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%) (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024					4	4	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024					1	1	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024					12	12	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024					12	12	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024					6	6	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024					5	5	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024					3	3	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024					5	5	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%) (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024			12	12	100		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024			12	12	100		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024			1	1	100		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024			17	17	100		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024			2	2	100		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024			63	63	100		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%) (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase PD yang telah memiliki layanan informasi	Persen	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024			10	10	100		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dan PD yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Persen	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024			3.2	3.2	100		
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024			3	3	100		
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024			3	3	100		
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024			2	2	100		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Persen	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024			100	100	100		
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang terkoneksi jaringan intranet	Perangkat Daerah	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024			53	53	100		
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024			1	1	100		
RENJA TAHUN 2025 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. JOMBANG								53		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%) (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024				1	1	100	
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	Aplikasi	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024				2	2	100	
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024				2	2	100	
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024				1	1	100	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024				2	2	100	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024				2	2	100	
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024				1	1	100	
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024				1	1	100	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%) (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	Persen	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024					100	100	100
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang digunakan dalam portal satu data	Data Sektoral	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024					28	28	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024					2	2	100
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024					1	1	100
Pengembangan Infrastruktur Statistik	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024					1	1	100
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024					1	1	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik	Persen	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024					50	50	100
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan layanan keamanan kominfo	Perangkat Daerah	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024					53	53	100
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024					1	1	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%) (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024				1	1	100	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024				53	53	100	

Hasil evaluasi berdasarkan tabel 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022, 2023 dan 2024 sub kegiatan berbeda berdasarkan indikator Kepmendagri Perubahan Nomenklatur Sesuai Dengan Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024 sehingga tidak dapat disandingkan dengan indikator kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2022 dan 2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menentukan skala penilaian kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Analisis kinerja pelayanan ini merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKU (Indikator Kinerja Utama) maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang

No	Indikator	SPM/NSPK/ SDGs	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	-	-	n/a	66 (sedang)	67 (sedang)	68 (sedang)	66.50	67.17	67 (sedang)	68 (sedang)	-
2	Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks IK-TIK)	-	-	n/a	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-
3	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan Informatika	-	-	n/a	2.75 terkelola	2.88 terkelola	2.94 terkelola	2.63	2.75	2.88 terkelola	2.94 terkelola	-
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	-	-	n/a	2.2 (terkelola)	2.5 (terkelola)	2.8 (terkelola)	n/a	2.26	2.5 (terkelola)	2.8 (terkelola)	-
5	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	-	-	n/a	290 (tinggi)	640 (tinggi)	690 (tinggi)	523	612	295 (tinggi)	300 (tinggi)	-
6	Nilai Evaluasi AKIP PD	-	-	80,00	80.05	80.10	80.15	80,11	79.19	80.10	80.15	



2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil reuiu pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang telah berlangsung cukup baik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai mediator masyarakat dengan aparatur dalam penyampaian informasi baik melalui media cetak, media sosial maupun media elektronik.

Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam penyelenggara penyampaian informasi di pemerintah daerah di berbagai wilayah dituntut untuk lebih produktif, rasional dan mengikuti perkembangan yang ada serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka masih terdapat beberapa permasalahan yang krusial dalam rangka pengembangan penyampaian informasi, diantaranya :

Form Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

NO	DESKRIPSI PERMASALAHAN BERDASAR URUSAN	NO	ISU STRATEGIS
1	2	3	4
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	BIDANG HKP		
1	Berita Media masih ada yang tendensius	1	Sosialisasi kepada media tentang pemberitaan seimbang
2	Belum semua OPD memanfaatkan media sosial dalam mempublikasikan kegiatan	2	Peningkatan kapasitas SDM di OPD yang difungsikan menjadi Humas
3	Perkembangan Teknologi Informasi yang tidak bisa dikendalikan	3	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan media secara bijaksana
4	Belum berfungsinya PPID Pembantu di masing-masing OPD secara optimal	4	Kurangnya optimalnya peran PPID pembantu yang ada di setiap OPD
5	belum siapnya OPD dalam menampung dan menindaklanjuti pengaduan pelayanan publik	5	Penguatan pelayanan pengaduan pelayanan publik terpadu melalui koordinasi lintas perangkat daerah
	BIDANG APTIKA		
1	Konektivitas jaringan intra belum menjangkau seluruh perangkat daerah dan seluruh wilayah desa/kelurahan	1	Masih rendahnya infrastruktur jaringan intra teknologi informasi dan komunikasi

NO	DESKRIPSI PERMASALAHAN BERDASAR URUSAN	NO	ISU STRATEGIS
1	2	3	4
2	Data center (pusat data) sebagai penempatan data dan aplikasi pemerintah daerah belum memiliki standar (SNI dan TIA-942) sebagaimana diamanatkan Pemerintah	2	Masih rendahnya infrastruktur pusat data teknologi informasi dan komunikasi
3	Pengembangan aplikasi SPBE di perangkat daerah yang belum sesuai peta rencana	3	Belum terintegrasinya sistem aplikasi SPBE antar perangkat daerah
4	Layanan kedaruratan 112 belum terintegrasi dan terpadu dengan layanan di perangkat daerah dan belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten	4	Penguatan kualitas layanan kedaruratan 112 yang terintegrasi
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN		
1	Data tersebar, tidak terupdate, tidak terstandar dan belum dianalisis	1	Penguatan daya dukung PD untuk pelaksanaan SDI; kapasitas SDM; sarpras portal satu data; data prioritas yang ditetapkan.
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN		
1	belum adanya kebijakan, proses dan teknologi dalam pengamanan informasi	1	Penyusunan dan pelaksanaan sistem keamanan data

Usaha penanggulangan masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah:

- Pengembangan aplikasi teknologi dan informasi guna peningkatan kualitas layanan publik baik dari sisi kemudahan, efisiensi waktu, biaya, dan administrasi. Memberikan informasi kepada masyarakat melalui *e-government* tanpa harus datang ke kantor dengan memberikan layanan media komunikasi elektronik selain di website juga melalui android dan IOS.
- Penyediaan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Meningkatkan kualitas SDM yang menangani infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Pelatihan untuk pegawai dalam bidang keilmuan komunikasi dan Informatika
- Mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dalam memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, baik antar sektor di lingkungan pemerintahan, pemerintah dengan stakeholders maupun pemerintah dengan masyarakat.

Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada media tentang pemberitaan seimbang;
2. Peningkatan kapasitas SDM di OPD yang difungsikan menjadi Humas;
3. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan media secara bijaksana;
4. Kurangnya optimalnya peran PPID pembantu yang ada di setiap OPD;
5. Penguatan pelayanan pengaduan pelayanan publik terpadu melalui koordinasi lintas perangkat daerah;
6. Pengembangan infrastruktur jaringan intra teknologi informasi dan komunikasi

7. Pengembangan infrastruktur pusat data teknologi informasi dan komunikasi
8. Belum terintegrasinya sistem aplikasi SPBE antar perangkat daerah
9. Penguatan kualitas layanan kedaruratan 112 yang terintegrasi
10. Penguatan daya dukung PD untuk pelaksanaan SDI; kapasitas SDM; sarpras portal satu data; data prioritas yang ditetapkan.
11. Penyusunan dan pelaksanaan sistem keamanan data

Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi dari Kemenkominfo RI tentang TIK.
2. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK.
3. Partisipasi masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM.
4. Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat.
5. Penyelenggaraan statistik sektoral.
6. Penerapan fungsi GPR (government public relations).
7. Edukasi internet sehat dan aman, kreatif dan produktif.
8. Sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah.
9. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2025, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun rancangan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo Kabupaten Jombang tahun 2025 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut:

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
PROVINSI JAWA TIMUR KABUPATEN JOMBANG

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Jombang	Persentase OPD yang telah memiliki layanan informasi	10%	6.960.886.130	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jombang	Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki layanan informasi	10%	2,272,108,850
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jombang	Persentase masyarakat dan OPD yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik)	3,4	6.960.886.130	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jombang	Persentase masyarakat dan PD yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	3.4%	2,272,108,850
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3 dokumen	3.022.258.250	Relasi Media	Jombang	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3 dokumen	1,614,060,880
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 dokumen	2.993.448.040	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jombang	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100%	125,174,190
Pelayanan Informasi Publik	Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2 dokumen	945.179.840	Diseminasi Informasi	Jombang	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	532,873,780
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jombang	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	100%	10.183.580.528	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jombang	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	100%	7,165,346,065
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jombang	Jumlah PD yang terkoneksi jaringan intranet	53 PD	6.292.392.128	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jombang	Jumlah PD yang terkoneksi jaringan intra	53 PD	55,771,920
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan	Jombang	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan	1 laporan	131.173.328	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan	Jombang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain	1 Dokumen	55,771,920

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Pemerintah Desa				
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jombang	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 sistem	6.161.218.800					
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jombang	jumlah aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	2 aplikasi	3.891.188.400	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jombang	Jumlah aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	2 aplikasi	7,109,574,145
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	630.594.800	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jombang	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	10 aplikasi	350,000,000
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jombang	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 pusat data	1.227.102.800	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jombang	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 laporan	253,479,145
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jombang	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 aplikasi	1.303.002.800	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jombang	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	10 aplikasi	747,717,500
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jombang	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 layanan	125.070.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jombang	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 aplikasi	84,650,000
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jombang	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen	570.768.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jombang	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	53 PD	803,270,000
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jombang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	34.650.000	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jombang	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Program	2,500,670,000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
					Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	4 aplikasi	69,787,500
					Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jombang	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	53 PD	2,300,000,000
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Jombang	Persentase sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik	55%	721.930.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jombang	Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik	55%	722,665,825
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jombang	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan layanan keamanan kominfo	53 PD	721.930.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jombang	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan keamanan kominfo	53 PD	722,665,825
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jombang	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 dokumen	151.260.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jombang	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	16,339,975
Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah/kota	Jombang	Jumlah laporan analisis dan kebutuhan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	1 laporan	166.386.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jombang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	84,896,150
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jombang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	166.386.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jombang	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	53 PD	621,429,700
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jombang	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	53 PD	202.520.000					

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Jombang	Persentase data statistik Sektor yang dipublikasikan	100%	1.244.591.810	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jombang	Persentase data Sektor yang dipublikasikan	Jombang	1,318,374,148
Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jombang	jumlah data statistik sektoral yang digunakan dalam portal satu data	28 data sektoral	1.253.708.720	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jombang	Jumlah data statistik sektoral yang digunakan dalam portal satu data	Jombang	1,318,374,148
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Jombang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	3 dokumen	387.169.750	Peningkatan Peran Statistik Sektor terhadap Sistem Statistik Nasional	Jombang	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Jombang	141,350,500
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jombang	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100 orang	251.032.540	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor	Jombang	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Jombang	1,096,473,748
Membangun Metadata Statistik Sektor	Jombang	Jumlah Metadata Statistik Sektor yang Dihimpun	1 dokumen	247.528.930	Penyelenggaraan Statistik Sektor yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jombang	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Jombang	55,108,300
Pengembangan Infrastruktur	Jombang	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 portal	257.950.000	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektor Sesuai Standar	Jombang	Jumlah Statistik Sektor yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik		25,441,600
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektor di Daerah	Jombang	Jumlah Data Statistik Sektor yang Dihimpun	1 dok	110.027.500					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jombang	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	7.517.647.086	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jombang	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	9,487,819,793
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	30.316.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	27,603,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	12.166.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	12,623,000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5.233.250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	14,980,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jombang	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100%	5.420.164.556	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jombang	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	32 orang/bulan	5,777,455,201
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/bulan	5.420.164.556	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/bulan	5,575,119,201
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	230.544.600	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	199,976,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5.233.250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	2,360,000
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jombang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jombang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	520.540.350	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jombang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	333,985,340
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	15.198.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	13,819,800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jombang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12 paket	72.617.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jombang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	62,088,100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	265.834.910	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	132,778,400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jombang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	57.205.720	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jombang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	46,080,440

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 media	12.645.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	12,612,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 kali	97.037.820	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	66,606,600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jombang	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	753.978.060	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jombang	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	770,906,900
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	432.300.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	393,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	321.678.060	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	377,906,900
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jombang	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	556.870.270	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jombang	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	1.336.229.533
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	46.321.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	47,540,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	233.805.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	196,075,110
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jombang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	117.532.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jombang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	106,338,000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63 unit	159.211.470	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63 unit	2,227,916,242

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan kegiatan dilakukan dari bawah dimulai dari Musrenbang tingkat Desa dilanjutkan tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Dalam prosesnya usulan dari desa diakomodir di tingkat kecamatan dan disesuaikan dengan usulan dari masing-masing SKPD yang disampaikan melalui Musrenbang Kecamatan. Hasil Musrenbang pada Dinas Kominfo Untuk tahun 2025 tidak ada usulan dari masyarakat.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai hubungan nasional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendukung keberhasilan pembangunan Nasional secara keseluruhan. Berdasarkan rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024, tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah. Sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi dan misi RPJMN 2020-2024 VISI : ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Digital mengacu pada Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Kabinet Merah Putih membawa visi besar untuk menjadikan Indonesia mandiri dan maju di era digital melalui program transformasi sesuai Asta Cita. Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur digital yang merata hingga ke pelosok tanah air, sebagai langkah strategis untuk menghapus kesenjangan digital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Langkah ini diiringi dengan digitalisasi data untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan koordinasi antar lembaga, yang menjadi landasan pemerintahan berbasis digital yang transparan dan akuntabel. Di sektor ekonomi, digitalisasi menjadi fokus utama untuk mendukung kemandirian bangsa, terutama dengan meningkatkan inovasi teknologi seperti pertanian digital dan platform pembiayaan bagi UMKM. Selain itu, pemerintah mendorong pengembangan sumberdaya manusia unggul melalui program literasi digital dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan serta industri. Inovasi digital juga dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya Indonesia secara global, menjaga identitas nasional, dan menciptakan ekosistem digital yang kompetitif. Melalui visi ini, Kabinet Merah Putih menegaskan komitmennya menjadikan digitalisasi sebagai motor penggerak kemandirian bangsa di era teknologi.

VISI Kementerian Komunikasi dan Digital Fokus program presiden yang selaras dengan Kemenkominfo yaitu **Sistem Pemerintahan yang Efisien dan Akuntabel**: Dengan reformasi birokrasi, diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, cepat, dan akuntabel, serta memperkuat kepercayaan publik. Harapan ini didorong oleh misi mereka untuk meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik dan memastikan bahwa pemerintah melayani kepentingan rakyat.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkomdigi memiliki sasaran strategis sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	
SS.01	Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau
SS.02	Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital
SS.03	Meningkatnya Konektivitas Layanan Pos
SS.04	Terwujudnya Konektivitas Next Generation Broadband Nasional
SS.05	Meningkatnya Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Kualitas Pengelolaan Layanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika
SS.06	Meningkatnya Pemanfaatan TIK di Sektor Ekonomi dan Bisnis
SS.07	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Digital
SS.08	Dukungan Implementasi Digitalisasi Pemerintah
SS.09	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
SS.10	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Komdigi Tahun 2020-2024

Adapun arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, meliputi :

1. Mengoptimalkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur;
2. Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi;
3. Mengoptimalkan regulasi Pengembangan dan Pemanfaatan Smart Province oleh Perangkat Daerah;
4. Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya;
5. Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Jawa Timur.

Tujuan RPD Tahun 2024-2026 Kabupaten Jombang yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik. Berdasarkan tujuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan konsep pelayanan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.
2. Mengembangkan aplikasi dan digitalisasi layanan publik, standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan yang ingin dicapai dari Renja Dinas Kominfo Tahun 2025 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi .

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Kominfo serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Renja Tahun 2025 Dinas Kominfo yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik.

Sasaran kinerja Dinas Kominfo yang telah direncanakan disusun indikator kinerja dan formulasi perhitungannya. Perhitungan formulasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi melalui Kualitas	1.1 Meningkatkan pemberdayaan Lembaga komunikasi publik dalam	1.1 Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	<p>pelayanan hubungan komunikasi pemerintah</p> <p>2.1 Meningkatkan layanan teknologi informasi untuk pelayanan publik</p> <p>2.2 Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan satu data</p> <p>2.3 Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah</p> <p>2.4 Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kominfo Kabupaten Jombang</p>	<p>informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi</p> <p>2.1 Mengoptimalkan layanan teknologi informasi untuk pelayanan publik</p> <p>2.2 Mengoptimalkan Pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya</p> <p>2.3 Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Jombang</p> <p>2.4 Mengoptimalkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Jombang</p>

FORM TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2024-2026

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD
2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan dan Efektif Serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Good Governance (IGG)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi melalui kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
							Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)
							Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IK-TIK)
							Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
							Indeks Pembangunan Statistik
							Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

3.3. Program dan Kegiatan

- a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya Pemerintah kabupaten Jombang dalam mencapai target, sasaran pembangunan dan arah kebijakan di tahun 2025 yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kominfo Tahun 2024-2026. Program pembangunan Dinas Kominfo tahun 2025 pada dasarnya menselaraskan prioritas Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Adapun faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja Renstra PD Tahun 2024-2026 serta target capaian kinerja tahun 2024 disertai dukungan program, kegiatan, sub kegiatan dan lokasi sasaran;
2. Permasalahan dan isu strategis daerah sesuai dengan tupoksi dan kewenangan PD;
3. Proses bisnis pencapaian kinerja PD dalam mendukung target indikator sasaran/kinerja daerah (Rancangan RPD Kab. Jombang Tahun 2024-2026), Standar Pelayanan Minimal, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs (jika TPB ada yang terkait), Rencana Aksi Daerah yang telah ditetapkan, Kebijakan Strategis Nasional maupun Provinsi;
4. Kegiatan Prioritas Kecamatan dan Pokok-Pokok pikiran DPRD yang diakomodir maupun yang tidak diakomodir.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Tahun 2025 antara lain :

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

• PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Relasi Media
- b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- c. Sub Kegiatan Diseminasi Informasi

- **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**

1. **Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

2. **Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional

- b. Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda

- c. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah

- d. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

- e. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

- f. Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas

- g. Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

- h. Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE

URUSAN STATISTIK

- **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

1. **Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

URUSAN PERSANDIAN

- **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN**

INFORMASI

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program dan Kegiatan di Dinas Komunikasi dan Publik tahun 2025 dilaksanakan sebagai berikut :

Bidang Aplikasi dan Informatika

- Penyediaan koneksi internet seluruh OPD, Kecamatan, dan area publik dengan bandwidth 5 Gbps;
- Penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah (JIPD) sebanyak 105 titik lokasi, diantaranya untuk koneksi privat layanan Dukcapil serta layanan Keuangan dan Aset Daerah;
- Penyelenggaraan ruang server dengan standar ISO 27001 untuk penempatan aplikasi seluruh OPD;
- Penyelenggaraan layanan cloud untuk skalabilitas aplikasi serta backup data;
- Penyelenggaraan integrasi aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis single sign on (SSO);
- Penyelenggaraan layanan Panggulan Darurat Call Center 112;
- Penyediaan akses internet area publik desa/kelurahan pada 306 titik desa/kelurahan

Bidang Humas dan Komunikasi Publik

- Penyusunan Konten Informasi Publik Kegiatan Pemkab Jombang melalui :
 - Website jombangkab.go.id
 - Media Social : Instagram dan Youtube
- Diseminasi Informasi : Jumpa Fans HUT Radio SJFM, Warung Pojok Kebonrojo, Kominfo Goes To School, Kegiatan Radio SJFM, Workshop LAPOR SP4N, Workshop PPID, Pembinaan KIM

- Penyelenggaraan Relasi Media melalui Kegiatan Ngopi Bareng Media Cetak, Media Online dan Ngopi Bareng Pegiat Medsos;
- Advertorial Kegiatan Pemkab Jombang dengan media cetak, media online dan media elektronik

Bidang Statistik dan Persandian

- Pengembangan Portal Satu Data
- Penyusunan Metadata Statistik Sektoral
- Penyusunan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- Penyusunan Dokumen Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi I-KTIK dan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IP-IKP)
- Pengembangan Portal Satu Data
- Penyusunan Metadata Statistik Sektoral
- Penyusunan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- Penyusunan Dokumen Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi I-KTIK dan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IP-IKP)

Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Jombang
Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Thn 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Jombang	100%	9,487,819,793	APBD		100%	9,487,819,793
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Jombang	100%	27,603,000	APBD		100%	27,603,000
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jombang	3 dokumen	12,623,000	APBD		3 dokumen	12,623,000
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jombang	5 laporan	14,980,000	APBD		5 laporan	14,980,000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Jombang	100%	5,777,455,201	APBD		100%	5,777,455,201
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jombang	35 orang/bulan	5,575,119,201	APBD		35 orang/bulan	5,575,119,201
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jombang	4 dokumen	199,976,000	APBD		4 dokumen	199,976,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Thn 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jombang	1 laporan	2,360,000	APBD		1 laporan	2,360,000
2.16.01.2.06	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jombang	100%	0	APBD		100%	0
2.16.01.2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jombang	12 paket	333,985,340	APBD		12 paket	333,985,340
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jombang	12 paket	13,819,800	APBD		12 paket	13,819,800
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jombang	6 paket	62,088,100	APBD		6 paket	62,088,100
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jombang	5 jenis	132,778,400	APBD		5 jenis	132,778,400
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jombang	3 media	46,080,440	APBD		3 media	46,080,440
2.16.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jombang	5 kali	12,612,000	APBD		5 kali	12,612,000
2.16.01.2.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jombang	100%	66,606,600	APBD		100%	66,606,600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Thn 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jombang	12 laporan	770,906,900	APBD		12 laporan	770,906,900
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jombang	12 laporan	393,000,000	APBD		12 laporan	393,000,000
2.16.01.2.09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jombang	100%	377,906,900	APBD		100%	377,906,900
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jombang	1 unit	47,540,000	APBD		1 unit	47,540,000
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jombang	17 unit	196,075,110	APBD		17 unit	196,075,110
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jombang	2 unit	106,338,000	APBD		2 unit	106,338,000
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jombang	63 unit	2,227,916,242	APBD		63 unit	2,227,916,242
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki layanan informasi	Jombang	10%	2,272,108,850	APBD		10%	2,272,108,850

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Thn 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dan PD yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Jombang	3.3%	2,272,108,850	APBD		3.3%	2,272,108,850
2.16.02.2.01.04	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Jombang	3 dokumen	1,614,060,880	APBD		3 dokumen	1,614,060,880
2.16.02.2.01.05	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Jombang	3 dokumen	125,174,190	APBD		3 dokumen	125,174,190
2.16.02.2.01.06	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Jombang	2 dokumen	532,873,780	APBD		2 dokumen	532,873,780
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Jombang	100%	7,165,346,065	APBD		100%	7,165,346,065
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang terkoneksi jaringan intra	Jombang	53 OPD	55,771,920	APBD		53 OPD	55,771,920
2.16.03.2.01.02	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Jombang	1 dokumen	55,771,920	APBD		1 dokumen	55,771,920
2.16.03.2.01.03	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	Jombang	1 sistem	7,109,574,145	APBD		1 sistem	7,109,574,145

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Thn 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.03.2.02	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Jombang	2 aplikasi	350,000,000	APBD		2 aplikasi	350,000,000
2.16.03.202.01	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jombang	1 dokumen	253,479,145	APBD		1 dokumen	253,479,145
2.16.03.202.03	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jombang	1 dokumen	747,717,500	APBD		1 dokumen	747,717,500
2.16.03.202.07	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jombang	2 dokumen	84,650,000	APBD		2 dokumen	84,650,000
2.16.03.202.08	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jombang	2 layanan	803,270,000	APBD		2 layanan	803,270,000
2.16.03.202.09	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Jombang	1 dokumen	2,500,670,000	APBD		1 dokumen	2,500,670,000
2.16.03.202.10	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Jombang	1 dokumen	69,787,500	APBD		1 dokumen	69,787,500
2.21.02	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Jombang	50%	2,300,000,000	APBD		50%	2,300,000,000
2.21.02.201	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	Jombang	53 OPD	1,318,374,148	APBD		53 OPD	1,318,374,148
2.21.02.201.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang digunakan dalam portal satu data	Jombang	1 dokumen	1,318,374,148	APBD		1 dokumen	1,318,374,148

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Thn 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.21.02.201.02	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Jombang	1 laporan	141,350,500	APBD		1 laporan	141,350,500
2.21.02.201.03	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Jombang	1 laporan	1,096,473,748	APBD		1 laporan	1,096,473,748
2.21.02.201.04	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Jombang	53 perangkat daerah	55,108,300	APBD		53 perangkat daerah	55,108,300
2.20.02	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Jombang	100%	25,441,600	APBD		100%	25,441,600
2.20.02.201	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik	Jombang	28 data sektoral	722,665,825	APBD		28 data sektoral	722,665,825
2.20.02.201.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan keamanan kominfo	Jombang	3 dokumen	722,665,825	APBD		3 dokumen	722,665,825
2.20.02.201.02	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jombang	100 orang	16,339,975	APBD		100 orang	16,339,975
2.20.02.201.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jombang	28 dokumen	84,896,150	APBD		28 dokumen	84,896,150
2.20.02.201.05	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jombang	1 unit	621,429,700	APBD		1 unit	621,429,700

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut telah terinci dan terencana dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 di mana nama program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya sebagai berikut :

Rencana program dan kegiatan tahun 2025 dijabarkan pada tabel berikut ini :

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
			K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%	100	9,487,819,793
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	%	100	27,603,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	12,623,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	14,980,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	orang/bulan	32	5,777,455,201
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	5,575,119,201
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	199,976,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2,360,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	333,985,340

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
			K	Rp
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	13,819,800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	62,088,100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	132,778,400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	46,080,440
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	12,612,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	66,606,600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	770,906,900
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	393,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	377,906,900
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	47,540,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	196,075,110
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	106,338,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	63	2,227,916,242
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki layanan informasi	%	10	2,272,108,850
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dan PD yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	%	3	2,272,108,850
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	3	1,614,060,880

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
			K	Rp
Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase	100	125,174,190
Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase	100	532,873,780
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	%	100	7,165,346,065
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang terkoneksi jaringan intra	Perangkat	53	55,771,920
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	1	55,771,920
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	aplikasi	2	7,109,574,145
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	10	350,000,000
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	1	253,479,145
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	10	747,717,500
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	2	84,650,000
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat	53	803,270,000
Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Program	1	2,500,670,000
Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi	4	69,787,500
Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat	53	2,300,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	%	100	1,318,374,148
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang digunakan dalam portal satu data	data	28	1,318,374,148

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
			K	Rp
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	70	141,350,500
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	100	1,096,473,748
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	1	55,108,300
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	1	25,441,600
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik	Persen	55	722,665,825
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan keamanan kominfo	PD	53	722,665,825
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	16,339,975
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	84,896,150
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat	53	621,429,700

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang pada tahun 2025 dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mewujudkan *Good Governance*.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2025 di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. Kedepan diharapkan Rencana Kerja ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya guna meningkatkan dan memperbaiki keberhasilan kinerja yang belum tercapai.

Hal - hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 antara lain:

1. Target capaian kinerja dari semua indikator kinerja dalam rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Evaluasi rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, kelompok sasaran, lokasi pelaksanaan, sumber pendanaan dan kebutuhan pagu indikatif dilaksanakan sesuai situasi, kondisi dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, kemampuan keuangan daerah serta menyesuaikan dengan kebijakan dan peraturan terbaru.
3. Fokus utama pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh, baik dari jajaran tertinggi hingga jajaran terendah dengan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan capaian kinerja, bukan sekedar menitikberatkan pada realisasi / penyerapan anggaran.

4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama internal, lintas instansi pemerintah, instansi swasta, maupun sektor informal yang terkait dengan tugas dan fungsinya masing – masing dalam rangka peningkatan kinerja.
5. Apabila pagu anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan perencanaan dikarenakan adanya penyesuaian dengan kekuatan anggaran, agar segera dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja.

Kaidah Pelaksanaan.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025, perlu memperhatikan kaidah – kaidah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing.
2. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.
3. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 memperhatikan / mempedomani dokumen perencanaan yang ada di atasnya yaitu RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPD Kabupaten, RKPD Kabupaten, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.
4. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah selama pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025, maka perubahan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terjadi akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Tindak Lanjut

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Jombang.
2. Peningkatan kualitas keamanan informasi di Kabupaten Jombang.
3. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik sehingga tercipta transparansi informasi di Kabupaten Jombang.
4. Peningkatan kualitas data sektoral sehingga bisa digunakan sebagai dasar perencanaan di Kabupaten Jombang.

Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kominfo ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik.

Jombang, Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**



ENDRO WAHYUDI, S.STP
Pembina Tk. I
NIP: 19800528199121001